

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Abdurrasjid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002).
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit UIN Sunan Kalijaga (SUKA-Press), 2021).
- Dewi, IGA Gangga Santi. *Kebijakan Pertanahan Di Indonesia* (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro (UNDIP Press), 2018).
- Effendi, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Alumni, 1983).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013)
- Mahagiyani, dan Sugiono. 2024. *Metodologi Penelitian*. N.p.: Poltek LPP Press.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. ke-8 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Ramadhani, Rezky D, dan Achmad Setiawan, ed., *Melanjutkan Indonesia dengan reforma agraria: pandangan anak muda* (Yogyakarta: STPN Press, Panitia Lomba Essay PolgovDay, 2015)
- Setiawan, I Ketut O. *Hukum pendaftaran tanah & hak tanggungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Sigit S. Nugroho, Muhammad Tohari, dan Mudji Mudji Rahardjo, *Hukum Agraria Indonesia*, ed. 1 (Solo, Jawa Tengah: Pustaka Iltizam, 2017)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020)
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Publika Global Mulia, 2024).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6649. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3696. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5804. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 373.

Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 986.

Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1298.

### **Jurnal-Junal**

Ardani, Mira Novana. "Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Gema Keadilan*, 6 (1), (2019)

- Arwana, Yudha Chandra, dan Ridwan Arifin. "Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Jambura Law Review*, 1(2), (2019).
- David M. Tampubolon dan Cokorda D. Dahana, "Penyelesaian Indikasi Sertipikat Tumpang Tindih/Ganda (Overlapping) Dalam Menjamin Legalitas Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kantor Pertanahan Kota Denpasar)," *Kertha Negara*, 11(9), (2023)
- Dewi, Nabila Nastiti, dan Herma Setiasih. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020: (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya)." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* (2024)
- Putra, Rengga Kusuma, Umami Kalsum, Rica Gusmarani, dan Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), (2024)
- Rafa Ardian, Rusma Renal C, Togarma Sinaga, dan Asep Suherman. "Efektivitas Metode Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 2025
- Rizki W. Rasyid dan Tamaulina Br. Sembiring, "Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih (*Overlapping*) Sertifikat Hak Atas Tanah," *Studi Multidisipliner*, 8(7), (Juli 2024)
- Sari, Indah. "Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), (2017)
- Siddiq, Syamsul Zainal, Ahyuni Yunus, dan Hamza Baharuddin. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), (2021)
- Yanuar Rozi Firmansyah. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan." *Cakrawala Hukum*, 8(2), (2017)

### **Skripsi**

- Ghina S. Utamingtyas, Skripsi: Penyelesaian Sengketa Sertipikat Tanah Hak Milik yang Tumpang Tindih di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Jual Beli di Kelurahan Pedurungan Tengah Kota Semarang), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2025).

M. Kafatakhur Rizal. "Peran Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai Pelaksana Percepatan Pendaftaran Tanah dalam Rangka Tertib Administrasi." Universitas Sultan Agung, 2021.

Sukma P. Sari, Skripsi: Analisis Penyelesaian Sengketa Sertipikat Tumpang Tindih dalam Hukum Agraria, (Semarang: Univesitas Islam Negeri Walisongo, 2023)

### **Website**

Badan Pusat Statistik. "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2025 - Tabel Statistik." diakses 26 Oktober 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi.html?year=2025>.

DIKLAR Humanistik, Kumparan. "*Problematika Sengketa Tanah Di Indonesia*" diakses 07 Desember 2025. <https://kumparan.com/diklar-humanistik/problematika-sengketa-tanah-di-indonesia-255svy99End/full>

### **Sumber Lain**

Ana Silviana, "Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah" (Semarang, Universitas Diponegoro, 2025)

Ana Silviana, "Sistem/Stelsel Publikasi Pendaftaran Tanah" (Semarang, Universitas Diponegoro, 2025)

Ruslan H. Irawan, "Pelaksanaan Mediasi di PN Semarang" (Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, 2024)